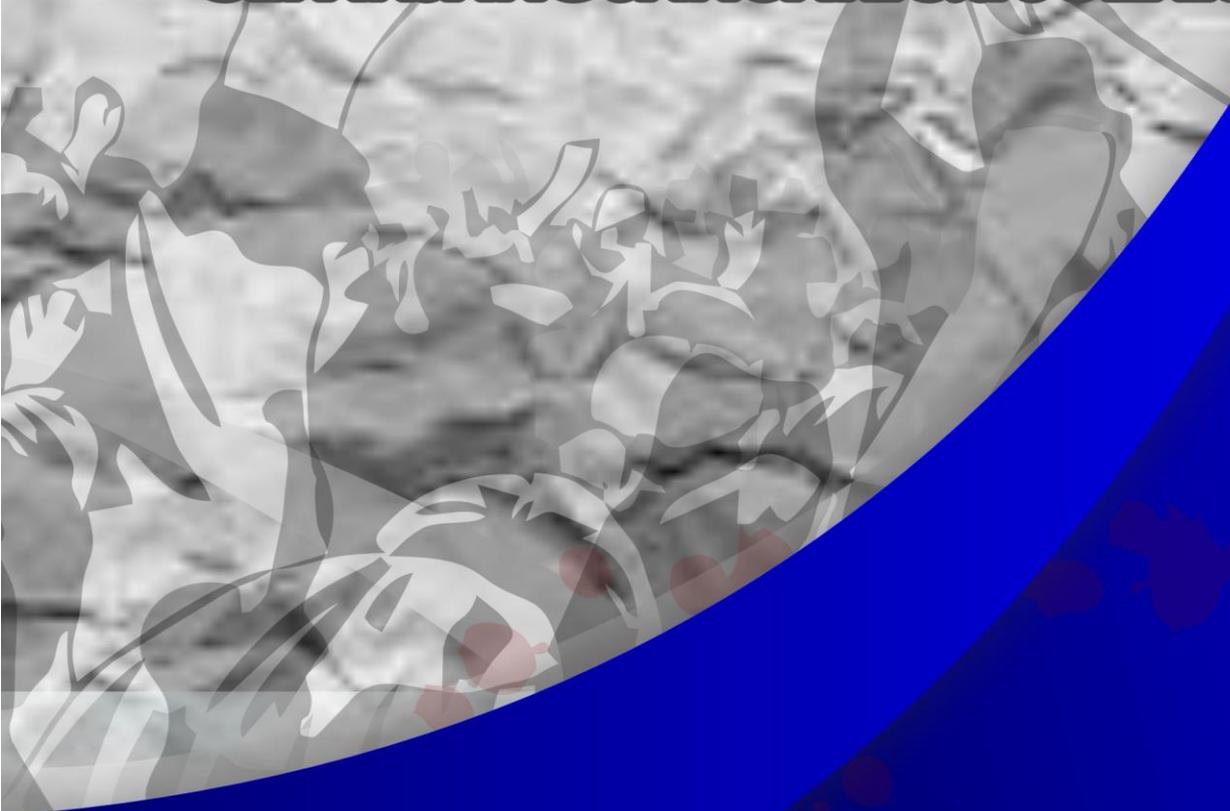
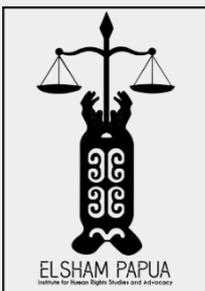


**“PEMBUMKAMAN RUANG BEREKSPRESI
SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA
SEPANJANG JANUARI s.d JULI 2022”**





ELSHAM PAPUA

(Institute For Human Rights Study and Advocacy)

Alamat: Jl. Kampus USTJ Padang Bulan Abepura, Kode Pos: 99331 Jayapura – Papua | Telp/Fax: +62 (967) 581600

Email: elsham.papua2020@gmail.com; Website: www.elshampapua.com



[elshampapua.com](http://www.elshampapua.com)



[elshampapua](https://www.facebook.com/elshampapua)



[elshampapua](https://twitter.com/elshampapua)



[@elshampapua](https://www.instagram.com/elshampapua)



[elshampapua](https://www.youtube.com/channel/UCelshampapua)

Laporan ini dibuat oleh Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, sebagai hasil dari Pemantauan Situasi Hak Asasi Manusia di Papua selama periode Januari-Juli 2022. Laporan ini diberi Judul “**Pembungkaman Ruang Berekspresi Situasi Hak Asasi Manusia di Papua Sepanjang Januari-Juli 2022**”. Berbagai peristiwa yang terjadi di Papua selama tujuh bulan ini. Tidak terlepas pada dinamika politik di Papua yang merupakan buntut panjang dari persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi Papua. Dalam laporan Elsham sebelumnya yang berjudul “**Mozaik Situasi Hak Asasi Manusia Di Papua (2019-2021)**”.

Dalam laporan ini Elsham Papua mendokumentasikan beberapa peristiwa penting yang terjadi antara lain: **Infografis Pengerahan Aparat Keamanan Ke Papua** : Dalam infografis ini Elsham menyajikan data jumlah, kesatuan aparat keamanan TNI/Polri yang dikirimkan bertugas di Papua selama periode Januari-Juli 2022, **Analisa Militerisme** : menjelaskan bagaimana keterkaitan pengerahan Aparat keamanan TNI/Polri ke Papua dengan situasi Papua. **Infografis Tolak DOB** : Menyajikan jumlah dan lokasi aksi demo penolakan pembentukan daerah otonomi baru di Papua. **Analisa Demontrasi Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB)** : menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi saat terjadi aksi demo tolak DOB dan melihat bagaimana DOB digunakan sebagai alat untuk kepentingan Negara dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam Papua. **Advokasi Kasus Makar**. Menyajikan data terkait jumlah tahanan Makar dan proses persidangan kasus makar yang selama tujuh bulan yang ditangani oleh Elsham Papua bersama-sama dengan Koalisi Pengacara HAM Papua.

Data dalam laporan ini merupakan hasil monitoring Elsham Papua secara langsung di lapangan. Maupun monitoring media sosial (online) dan media massa. Semua data yang dipaparkan dalam laporan ini merupakan kontribusi Staf Kantor Pusat Elsham Papua di Jayapura dan Pos Kontak Elsham yang ada di beberapa daerah seperti Fakfak, Yapen, Nabire, Keerom. Adapun tim penulis yang terlibat dalam penulisan laporan ini semua dikerjakan oleh Staf Elsham Papua yang terdiri dari Staf Program Monitoring dan Investigasi, Staf Program Advokasi, Staf Program Informasi dan Dokumentasi, dan Staf Program Perempuan.

Demikian laporan Situasi HAM periode Januari – Juli 2022. Kami sangat berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melihat situasi Hak Asasi Manusia di Papua. tetapi juga, sebagai bahan untuk kerja-kerja pengorganisasian,

KATA PENGANTAR



pendampingan, advokasi dan kampanye HAM Papua baik ditingkat local, nasional, dan internasional

Jayapura, 31 agustus 2022

Pdt. MATHEUS ADADIKAM. S.Th

Direktur Elsham Papua

Berbagai deretan peristiwa penting di Papua sepanjang bulan Januari sampai bulan Juli 2022 berhasil dipantau dan dicatatkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua. Dari sekian isu yang mencuat, Elsham Papua mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi di Papua dalam kurung waktu tujuh bulan tersebut. Peristiwa penting itu antara lain Droning Aparat Keamanan, Demotransi Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB), Militerisme, dan Pengadilan HAM Kasus Makar.

Elsham Papua mencatat sejak Januari hingga Juli 2022, pengerahan Aparat Keamanan ke Papua sebanyak 11.660 pasukan yang merupakan aparat gabungan TNI dan Polri. Berbagai istilah pengamanan digunakan untuk melanggengkan pengerahan Pasukan ke Papua. Sebelumnya pada tahun 2021 terbentuk satgas Nemangkawi dan memasuki tahun 2022 pada bulan Januari berganti nama menjadi satgas Cartenz, selain itu ada Satgas Pengamanan Daerah Rawan, Satgas Pengamanan Obyek Vital Negara, Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan.

Di periode yang sama Januari – Juli 2022 Elsham mencatat dan mendokumentasikan aksi-aksi demonstrasi Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di berbagai daerah di Papua. Pro dan kontra pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi isu hangat di Papua berbagai kalangan berbicara memberikan pandangan terkaitat pembentukan Daerah Otonomi Baru. Bagi pihak yang pro melihat pemekaran sebagai solusi bagi pembangunan Papua. Tetapi, bagi pihak yang kontra melihat bahwa pembentukan daerah otonomi baru merupakan peluang bagi Negara untuk menguasai hak-hak masyarakat adat dan tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat adat.

Disisi lain Negara tidak mendengar masukan dari masyarakat, bahkan masukan dari MRP yang merupakan lembaga representatif orang asli Papua. Negara memaksakan keinginannya untuk pembentukan daerah otonomi baru. Tanpa, melihat dampak perpecahan yang terjadi di masyarakat asli Papua. Dimana Elsham melihat situasi ini akan sangat mungkin mengarah kepada konflik horizontal antar masyarakat asli Papua yang Pro dan Kontra.

Elsham juga mencatat dalam aksi-aksi demotransi menuntut penolakan daerah otonomi baru. Dalam hal pengamanan aparat keamanan juga melakukan aksi represif kepada masa aksi untuk pembubarkan secara paksa. Tercatat ada sebanyak ada 1.181 personil gabungan TNI/Polri dalam pengamanan aksi demo tolak DOB pada tanggal 10 Mei 2022 di Kota Jayapura.

RINGKASAN UMUM

Elsham melihat ada kepentingan Negara dalam pembentukan Daerah Otonomi Barudi Papua. Hal ini, berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Juga akan berdampak kepada semakin tingginya pengerahan Aparat Keamanan Non Organik ke Papua.

Periode tujuh bulan ini juga Elsham Papua aktif mengadvokasi kasus Makar yang sudah dalam proses persidangan. Dalam semua kasus Makar yang terjadi, satu kasus yang berkaitan dengan aksi demo tolak Rasisme, satu kasus pengibaran bendera Bintang Kejora, dan satu kasus terkait kepemilikan atribut Papua Merdeka. Satu kasus Makar sudah mendapatkan putusan bebas yaitu kasus makar kepemilikan atribut Papua Merdeka.

Ani Sipa

Manager Program

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN UMUM	v
DAFTAR ISI	vii
LATAR BELAKANG	1
PENGERAHAN MILITERISME KE PAPUA	5
ANALISA MILETERISME	6
DEMOTRASI PENOLAKAN DAERAH OTONOMI BARU.....	8
ANALISA DAERAH OTONOM BARU	9
DATA KASUS MAKAR	11
ANALISA KASUS MAKAR	12
LAMPIRAN TEBEL	15

New Guinea atau hari ini dikenal dengan Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 785.753 kilometer persegi, Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa terutama dari sektor tambang dan migas. Sumber daya alam yang kaya ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat Papua malah membawa mala petaka bagi rakyat Papua. Negeri yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah itu termasuk wilayah termiskin di Indonesia.

Papua dijuluki sebagai daerah Rawan Konflik antara TNI-POLRI dan warga pro Papua merdeka bermula sejak 1961 setelah adanya pembubaran Negara West Papua oleh NKRI melalui TRI-KORA. Menurut pro Papua merdeka Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak menghargai hak-hak politik rakyat Papua untuk merdeka atas tanah Papua.¹ Tindakan sewenang-wenang itu berlanjut sampai pada adanya perjanjian-perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Amerika, Belanda dan Indonesia seperti Perjanjian New York 15 Agustus 1962², Perjanjian Roma 30 September 1962³ sampai pada Penyerahan Orang Papua dan tanah Papua kepada Indonesia 1 Mei 1963. Penandatanganan Kontra Karya Freeport 7 April 1967 tanpa melibatkan pemilik ulayat dan dilakukan sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan menjadi bukti bahwa Negara ini tidak menghargai Orang Papua sebagai pemilik Tanah.

Tindakan sewenang-wenang Negara Indonesia yang tidak menghargai hak-hak rakyat Papua itu terus berlanjut sampai pada keberlanjutan Otsus Jilid II dan Daerah Otonomi Baru yang ditandatangani secara sepihak oleh para elit Politik.

Pengesahan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB) Papua telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022⁴ dan di ajukan ke pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah (Perpu). Proses keberlanjutan Otsus Jilid II tidak berdasarkan Kemauan Rakyat Papua, itu terbukti adanya proses besar-besaran yang dilakukan oleh Rakyat Papua di Seluruh Tanah Papua dan di Indonesia Pada Umumnya.

Sebanyak 714.066 orang Papua dan 122 organisasi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) melakukan protes atas rencana keberlanjutan Otsus Jilid II di atas Tanah Papua. Petisi rakyat Papua diluncurkan pada 4 Juli 2020,⁵ di Holandia Jayapura guna merespon tindakan sewenang-wenang negara atas keberlanjutan Otonomi Khusus

¹ <https://suarapapua.com/2013/06/05/pepera-1969-di-papua-dimenangkan-tni-polri/>

² <https://www.viva.co.id/edukasi/1447468-perjanjian-new-york>

³ <https://jubi.co.id/aktivis-tolak-roma-agreement/amp/>

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1607178/dpr-resmi-sahkan-tiga-ruu-dob-papua-hari-ini>

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=eCtKnJl4G0c>

Jilid II. Petisi rakyat Papua sebagai gerakan front yang bergerak untuk menggalang kekuatan rakyat atas kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Front Petisi Rakyat Papua berkonsolidasi dan membuka sekber di seluruh wilayah Indonesia dan Internasional guna menolak kebijakan elit Politik atas tanah Papua.

Hampir seluruh rakyat Papua menolak adanya keberlanjutan Otsus Jilid II diatas Tanah Papua dan menuntut kepada Negara Indonesia untuk membuka ruang guna menentukan nasib sendiri. Tuntutan itu dapat dilihat melalui demonstrasi besar-besaran di Papua dan Se-Jawa Bali, demonstrasi menyampaikan pendapat dimuka umum dengan tuntutan tolak otsus dan berikan hak penentuan nasib sendiri tidak hanya dari rakyat Papua tetapi juga datang dari solidaritas Internasional, Tiga Dominasi Dewan Gereja⁶ di Papua, 57 Pastor Pribumi⁷ dan didukung Juga Oleh TPNPB.

Sesuai monitoring Elsham Papua, dalam 7 bulan terakhir terhitung dari Januari 2022-Juli 2022, penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua Bersama 122 organisasi berkali-kali mengalami tindakan represif oleh pihak keamanan Indonesia (TNI-POLRI). Berbagai tindakan represif penangkapan, Pembunuhan Diluar Hukum seperti di Yahukimo saat warga melakukan aksi besar-besaran diantaranya 3 orang meninggal dunia, 3 orang mengalami luka berat, 5 orang mengalami luka ringan.

Ruang untuk menyampaikan pendapat tolak Otsus dan DOB dimuka umum diperketat dan dibatasi oleh aparat penegak Hukum, itu terbukti bahwa rakyat dipaksakan untuk ikut kemauan Jakarta atas kepentingan Sumber daya Alam di Papua. . Tindakan represif itu tidak hanya dilakukan saat ujuk rasa saja tetapi tindakan teror dan penangkapan terhadap aktivis juru bicara PRP Internasional Viktor Yeimo dan Juru Bicara Nasional Jefri Wenda.⁸ Demonstrasi dan protes tolak otsus Petisi rakyat Papua dalam 7 bulan Terakhir dilakukan dibawah tekanan aparat gabungan TNI-POLRI, penyampaian pendapat tidak pernah diberi ruang satupun untuk menyampaikan aspirasinya dihadapan yang berwenang.⁹ Tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum hanya melindungi jalannya demonstrasi namun tindakan aparat dengan

⁶ <https://suarapapua.com/2022/03/21/dewan-gereja-papua-sebut-pemekaran-di-tanah-papua-jalan-mempercepat-pemusnahan-oap/>

⁷ <https://suarapapua.com/2020/07/21/57-pastor-pribumi-papua-minta-negara-beri-kesempatan-untuk-referendum-di-papua/>

⁸ <https://jubi.id/tanah-papua/2022/usai-penangkapan-jubir-petisi-rakyat-papua-sejumlah-barang-di-kantor-kontras-hilang/>

⁹ <https://elshampapua.com/2022/05/12/media-release-nomor-20-dir-elsham-mr-v-2022-elsham-papua-menyikapi-perlakuan-represif-aparat-keamanan-dalam-penanganan-demonstrasi-tolak-otonomi-khusus-otsus-dan-daerah-otonomi-baru-dob-10-mei/>

sewenang-wenang melakukan pembungkaman ruang demokrasi. yang paling paranya aparat menggunakan senjata api untuk menembak massa. Aparat juga dengan sewenang-wenang memasuki menguasai lembaga kemahasiswaan seperti UNCEN guna membubarkan Massa aksi mahasiswa di lembaga Kampus.¹⁰

Dilihat dari tindakan yang melebihi batas, kekuasaan Jakarta dipusatkan kepada aparat TNI-POLRI di Papua, guna memuluskan produk Otonomi Khusus dan Pemekaran di Papua. Dari pantauan Elsham Papua dalam setiap kali aksi aparat gabungan menurunkan kekuatan sekitar 600 - 2.000 personil aparat gabungan. Pendekatan militeristik diatas tanah Papua yang berlebihan akan membawahkan masalah baru yang tidak akan pernah terselesaikan. Elsham Papua juga memonitor adanya pengiriman Personil dari wilayah Indonesia lain ke papua dalam 7 bulan terakhir (lihat Infografis).¹¹

Kebijakan melewati batas menggunakan militeristik untuk membungkam ruang-ruang demokrasi, hak-hak orang Papua yang mana diurus oleh para elit menduga bahwa adanya kepentingan Eksploitasi sumber daya alam dibalik keberlanjutan Otsus dan Pemekaran di Papua. Kepentingan atas sumber daya alam itu terus meningkat di Papua. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Companies Market Cap pada 11 Januari 2022, menyangkut perusahaan tambang berkapitalisasi pasar terbesar di Papua diantaranya; BHP Group (Berkapitalisasi mencapai 162,71), Rio Tinto (berkapitalisasi mencapai 117,74), Vale (kapitalisasi pasar senilai 70,90), Glencore (kapitalisasi pasar senilai 70,43), China Shenhua (kapitalisasi pasar senilai 66,88), Freeport-McMoRan (kapitalisasi pasar senilai 61,11), Anglo-American (kapitalisasi pasar senilai 58,06), Southern Copper (kapitalisasi pasar senilai 49,36), Nornikel (kapitalisasi pasar senilai 48,47), Newmont (kapitalisasi pasar senilai 48,18).¹²

Dengan adanya kepentingan pemodal dan lowongan terbesar atas Sumber daya alam di Papua untuk di eksploitasi, Pemerintah Indonesia memaksakan adanya keberlanjutan Otsus Jilid II dan menambah Pemekaran wilayah di Papua. Melkias Hetaria dalam kajian singkat mengemukakan bahwa secara APBD dan pendanaan tidak memenuhi syarat untuk membentuk pemekaran baru di Papua. Hetaria juga menemukan ada Kabupaten yang pendapatan asli daerah (PAD) sangat rendah kurang dari 1 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena itu, seharusnya bergabung

¹⁰ http://presisi.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI_09_26052016_083833.pdf

¹¹ <https://elshampapua.com/infografis-pengerahan-pasukan-ke-papua-januari-juni-2022/>

¹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/daftar-perusahaan-tambang-berkapitalisasi-pasar-terbesar-ada-yang-di-papua>

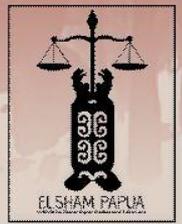
kembali ke Kabupaten induk diantaranya Nduga, Yahukimo, Pengunungan Bintang dan Puncak.¹³ Adapula peneliti Ahli Gugus Tugas Papua UGM, Dr. Gabriel Lele menyebutkan beberapa persyaratan pembentukan daerah Otonomi Baru (DOB) memang masih belum terpenuhi.¹⁴ Peneliti Universitas Papua Ngurah Suryawan, Juga Mengkritik wacana pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI. Katanya dua hal yang menjadi sorotan, yaitu minimnya kajian mendalam serta tidak dilibatkan rakyat Papua dalam keputusan. Desain pemekaran dalam konteks di Papua itu seharusnya harus matang persiapannya, tidak bisa secepat yang ada sekarang perlu kajian mendalam.¹⁵

Dengan adanya kritikan para peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa Elit Politik Papua dan Jakarta dimanfaatkan Oleh Kepentingan para pemodal untuk mengeksploitasi sumberdaya alam di Papua. Pemekaran Daerah Otonomi Baru yang sedang didorong oleh para elit dinilai tidak memenuhi syarat itu akan menguntungkan orang lain dan akan memperpanjang konflik di Papua.

¹³ <https://tirto.id/tak-ada-daerah-di-papua-yang-memenuhi-syarat-pemekaran-provinsi-eC2g>

¹⁴ <https://ugm.ac.id/id/berita/18976-ugm-paparkan-hasil-kajian-pemekaran-provinsi-papua-tengah>

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/17314161/pakar-kritik-pembentukan-3-provinsi-baru-tanpa-kajian-mendalam-dan-tak?page=all>



Januari s.d Juni 2022

PENGERAHAN PASUKAN TNI - POLRI KE PAPUA

04 Januari 2022 Tidak Diketahui TNI AU, Korps Pasukan Khas (Pakhas). Batalyon 462	17 Januari 2022 Tidak Diketahui Raider 431/satria Setia Perka ke Kodam XVII Cenderawasih	18 Januari 2022 1.925 MABES POLRI dan	22 Januari 2022 105 POLDA RIAU	26 Januari 2022 1.500 BRIMOB NUSNTARA
27 Januari 2022 6 POLDA METRO JAYA	28 Januari 2022 450 Yonko 462 Paskhas TNI AU, dan Batalyon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 136/Tuah Sakti. Serta Satgas Yuni f R 301/ PKS Brigif 15/k	23 Februari 2022 510 Brimob Polda Sulawesi Tenggara, Polda Metro Jaya, Polda Banten dan Polda Kalimantan	24 Februari 2022 400 Batalyon infanteri Raider Khusus 113/ Jaya Sakti	15 Maret 2022 100 Polda Papua kirim 2 peleton Brimob ke Dekati
18 Maret 2022 400 Batalyon Infanteri Raider 142 Ksatria Jaya Kodam II Sriwijaya	29 Maret 2022 850 Infanteri Mekanis 521/Dadaha Yodha dan Yonif Raider 613 Raja Alam.	29 Maret 2022 102 Polda Kalimantan Selatan	29 Maret 2022 400 Batalyon infanteri Yonif 113 Jaya Sakti milik Kodam Iskandar Muda	02 April 2022 205 Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumatra Utara
11 April 2022 150 Brimob dan Sabhara Polda Papua Barat	23 April 2022 1.261 Polda Papua Barat	14 Mei 2022 450 Infanteri Raider 600/Modang, Kodam Mulawarman	21 Mei 2022 555 Yonif 405 /Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna. Jawa Tengah	01 Juni 2022 Tidak Diketahui Brimob Papua
03 Juni 2022 200 315 Yonif Garuda	05 Juni 2022 450 Pasukan Kuda - Pangdam Jaya	06 Juni 2022 900 - Batalyon Infanteri Mekanis 203. Mekanis 1 PIK/JS - Yonif R 321/GT Kostrad	10 Juni 2022 100 Kapassus	19 Juni 2022 32 Dansat Brimob, kabid Propam dan Direskrisus.
22 Juni 2022 500 Polda Sumatra dan Polda Riau.	22 - 23 Juni 2022 105 Yonif RK 753/AV , BKO, Brimob Polda Papua dan Polres Nabire.	<h2>11.660 PERSONIL TNI /POLRI DI TANAH PAPUA</h2>		

Kebijakan Negara yang Militeristik di Tanah Papua bukanlah merupakan hal baru, sejak awalnya menjadi bagian dari Indonesia Papua sudah menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Elsham Papua melihat bahwa hingga saat ini Kebijakan Militeristik masih menjadi alat Negara untuk melanggengkan Politik Penguasaan Negara di Tanah Papua. Elsham juga melihat bahwa Negara terkesan memelihara konflik kekerasan yang terus-menerus terjadi di Tanah Papua. Hal ini dilihat dari respon Negara terhadap perkembangan situasi sosial Politik di Tanah Papua yang selalu di tangani dengan pendekatan militeristik, dimana pengiriman-pengiriman pasukan ke Papua masih sangat masif hingga saat ini. Elsham Papua mencatat pada tahun 2019 terdapat sebanyak 16.014 personel dikirim ke Tanah Papua, tahun 2020 sebanyak 7.874 personel, dan tahun 2021 sebanyak 20.002 personel.

Dalam tahun 2022 ini sejak bulan Januari - Juli 2022 Elsham Papua mencatat sebanyak 11.660 personel dikirim ke Tanah Papua. Pada pertengahan tahun 2022 ini, tercatat Operasi militer di Tanah Papua dilakukan dengan beberapa Sandi-sandi Operasi seperti Operasi Amole, Satgas Cartenz, operasi ketupat, operasi mansinam, Operasi pengamanan perbatasan, satgas pengamanan daerah rawan, dan operasi pengamanan obyek vital Negara yang bertujuan untuk pengejaran TPNPB, Pengamanan perbatasan, pengamanan daerah rawan, dan pengamanan obyek vital Negara.

Elsham Papua merasa Dengan pelanggaran kebijakan militeristik Negara di Tanah Papua sampai saat ini tidak terlepas dari kepentingan investasi kapitalis untuk tujuan penguasaan Sumber Daya Alam di Tanah Papua. Blok Wabu di Intan Jaya merupakan contoh nyata dimana Negara memaksakan kehendaknya tanpa mendengar suara masyarakat asli Intan Jaya yang menolak dibukanya areal tambang baru. Fenomena pemaksaan Daerah Otonomi Baru oleh Negara juga tidak terlepas dari peran militer TNI/Polri yang menjadi alat penyukses pemaksaan ini. Kita bisa melihat hal ini dengan jelas disaat aksi-aksi demonstrasi penolakan Daerah Otonomi Baru yang rutin di lakukan setiap bulan di Tanah Papua dan dibeberapa daerah lainnya selalu mendapat perlakuan represif dari aparat keamanan.

Pengiriman pasukan yang terus terjadi ke Tanah Papua menciptakan persosalan baru seperti pengungsian besar - besaran di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Puncak, dan Puncak Jaya. Elsham Papua merasa Negara lalai dan tidak memberikan perhatian serius kepada rakyat sipil yang menjadi korban pengungsian. Negara tidak melihat hak-hak hidup rakyat sipil yang menadi korban pengungsian,

dimana rakyat sipil menjadi korban salah tembak, anak-anak tidak mendapat fasilitas pendidikan karena gedung sekolah di tempati aparat, tidak adanya fasilitas kesehatan, anak kurang gizi, perempuan melahirkan di hutan, meninggal dalam pengungsian, selain itu Masyarakat sipil juga tidak bisa berkebun karena alat-alat kebun di sita atau diambil aparat,

Elsham Papua juga melihat kebijakan militeristik di Tanah Papua merupakan bagian tidak terlepas dari tindakan rasisme terhadap Orang Asli Papua. Dimana Negara dan kebijakan militeristiknya hanya berfokus pada penguasaan Sumber Daya Alam di Tanah Papua. Negara sama sekali tidak peduli dengan keberlangsungan hidup rakyat sipil Orang Asli Papua yang menjadi korban dari kebijakan ini. Bukti yang bisa kita lihat bersama adalah saat Mahasiswa Papua melakukan aksi penggalangan dana atau demo untuk pengungsian di bubarkan oleh Aparat Keamanan. Hal ini menimbulkan kesan Negara ingin menutup-nutupi realita konflik kekerasan yang terus terjadi.



GELOMBANG AKSI

PRP MAHASISWA, & RAKYAT PAPUA
Januari s.d Juli 2022

DEMONSTRASI DI BERBAGAI DAERAH DI PAPUA PADA AWAL TAHUN 2022, PASCA PENETAPAN **UU NO. 2 TAHUN 2021** TENTANG PERUBAHAN KEDUA OTONOMI KHUSUS BAGI **PROVINSI PAPUA**, DAN JUGA PENGUSULAN **DAERAH OTONOMI BARU (DOB)** BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.

■ **11 JANUARI 2022**
SORONG

■ **08 MARET 2022**
KOTA JAYAPURA

■ **10 Maret 2022**
WAMENA

■ **11 Maret 2022**
JAKARTA

■ **14 MARET 2022**
PANIAI, & SORONG

■ **28 MARET 2022**
MANOKWARI & JAYAPURA

■ **31 MARET 2022**
NABIRE

■ **01 APRIL 2022**
JAYAPURA, SORONG & KAIMANA

■ **10 MEI 2022**
JAYAPURA, MANOKWARI, KAIMANA, YOGYAKARTA, & MALANG

■ **11 MEI 2022**
ENAROTALI - PANIAI

■ **17 MEI 2022**
SERUI - KEP. YAPEN

■ **21 MEI 2022**
MALANG - JAWA TIMUR

■ **25 MEI 2022**
WAMENA - JAYAWIJAYA

KAMI TOLAK
OTSUS JILID II
PEMEKARAN DOB
TERORIST

■ **15 MARET 2022**
YAHUKIMO

■ **18 MARET 2022**
JAYAPURA

■ **19 MARET 2022**
JEMBER, JAWA TIMUR

■ **21 MARET 2022**
SORONG & SENTANI-KAB. JAYAPURA

■ **22 MARET 2022**
MIMIKA (DEMO DUKUNG DOB)

■ **23 MARET 2022**
GORONTALO - SULAWESI UTARA

■ **24 MARET 2022**
JAYAPURA

■ **01 APRIL 2022**
JAYAPURA, SORONG & KAIMANA

■ **02 APRIL 2022**
JAKARTA

■ **05 APRIL 2022**
WAMENA - JAYAWIJAYA

■ **07 APRIL 2022**
YAHUKIMO

■ **11 APRIL 2022**
JAKARTA

■ **13 APRIL 2022**
MIMIKA

■ **25 APRIL 2022**
BIAK - KEP. BIAK NUMFOR

■ **29 APRIL 2022**
DOGIYAI

■ **02 JUNI 2022**
JAYAPURA

■ **03 JUNI 2022**
JAYAPURA, TIMIKA, WAMENA, NABIRE, MERAUKE, YAHUKIMO, & SORONG

■ **14 JULI 2022**
JAYAPURA, NABIRE, WAMENA, YAHUKIMO, SORONG, KAIMANAN, JEMBER, MALANG, SURABAYA, & BALI

■ **29 JULI 2022**
JAYAPURA, WAMENA, MANOKWARI, SORONG, TERNATE, BALI, & MALANG

Pro-kontra Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi isu hangat di Tanah Papua dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada awal 2022 ini rencana pembentukan DOB di Tanah Papua menjadi gencar dibicarakan dimana-mana. Elsham sendiri melihat kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) ini sebagai kebijakan yang dipaksakan secara sepihak oleh Negara .

Dimana Negara sebagai pemegang kekuasaan memaksakan kehendaknya tanpa mendengar rakyatnya di akar rumput. Negara tidak mendengar aspirasi masyarakat Papua yang secara rutin melakukan penolakan DOB, dalam prosesnya Negara juga melanggar Moratorium atau kebijakan penundaan pemekaran daerah baru yang masih berlakusampai saat ini. Negara juga tidak mendengar saran MRP sebagai lembaga representatif di Papua yang menolak DOB . Bukti nyata pemaksaan DOB secara sepihak adalah pengesahan RUU DOB oleh Negara pada 30 Juni 2022.

Dalam proses pemaksaan DOB ini, Negara seperti dengan sengaja menciptakan praktek politik adu domba antara sesama orang Papua. Hal ini bisa dilihat dari adanya kelompok-kelompok tandingan yang dipimpin oleh Orang Papua menerima DOB, seperti Lenis Kogoya Ketua LMA bentukan Pemerintah, yang menyebarkan pesan suara dengan ajakan terima DOB 1 Juni 2022 membuat kelompok tandingan. Pemangku-pemangku kepentingan di Papua juga turut menjadi agen penyukses politik pemaksaan DOB di Tanah Papua. Sementara rakyat Papua terus menentanginya dengan melakukan aksi tolak DOB yang sangat gencar.

Tidak hanya pemangku kepentingan, kami juga melihat Negara melalui institusi Kepolisian turut serta dalam Kebijakan pemaksaan pemekaran DOB di Tanah Papua. Hal ini bisa dilihat melalui pernyataan Kapolda Papua yang meminta rakyat Papua untuk berhenti melakukan demonstrasi tolak DOB . Negara melalui institusi Kepolisian juga melanggengkan praktek politik penguasaan Negara dalam pemaksaan DOB. Sebagai contohnya, pada 10 Mei 2022 pelaksanaan Demonstrasi Tolak Otonomi Khusus dan DOB pada beberapa titik di Jayapura dibubarkan secara paksa oleh gabungan aparat keamanan TNI/POLRI. Dalam pembubaran paksa masa aksi demonstrasi damai, aparat keamanan melakukan pengerahan pasukan yang sangat berlebihan. Kapolresta Jayapura Kombes Pol Gustav Urbinas mengatakan 1.181 personil TNI/POLRI diturunkan dalam penanganan aksi ini. Aparat keamanan juga menggunakan peralatan militer yang sangat

berlebihan seperti menyemprotkan air dengan tekanan tinggi dari mobil water cannon sehingga merubuhkan para demonstrator, menembakan gas air mata dan peluru karet, menggunakan pisau/sangkur, melakukan pemukulan dengan tongkat kayu dan tameng, menendang, menginjak dan melakukan pengejaran kepada peserta aksi. Akibat dari tindakan represif aparat ini setidaknya ada 17 orang yang mengalami luka-luka.

Elsham juga melihat dalam praktek pemaksaan DOB ada kepentingan politik Negara yang lebih besar di Tanah Papua yaitu kepentingan eksploitasi Sumber Daya Alam, yang pada kenyataannya sangat mengancam eksistensi kehidupan Orang Asli Papua. hal ini bisa dilihat dari pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan masa depan Indonesia ada di Papua. “Kondisi alam di Papua masih sangat bagus hutannya bagus. Punya kekayaan tambang, perikanan dapat dikelola dengan pendekatan industri hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT)” .

Kami melihat pemaksaan DOB sebagai bagian tidak terpisahkan dari tindakan rasisme. Dimana Jakarta melihat orang Papua sebagai objek yang tidak mampu bersuara untuk dirinya sendiri, sehingga Orang Papua harus dibantu dengan memberikan jalan yang dianggap benar versi Jakarta yaitu DOB. Kami juga melihat bahwa Negara Indonesia menggunakan DOB sebagai jalan aman untuk praktek pelanggaran kekuasaannya di atas Tanah Papua, ditengah konflik kekerasan dan situasi pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Elsham melihat dengan adanya 3 wilayah DOB di atas tanah Papua, kedepannya akan masuk banyak pendropingan pasukan pembentukan pusat-pusat komando militer baru di wilayah-wilayah baru, transmigrasi besar-besaran, marginalisasi Orang Asli Papua, dan akan makin banyak konflik kekerasan yang akan terus terjadi. Dengan droping pasukan Brimob ke Papua menjelang pengesahan DOB 30 Juni 2022 , merupakan bukti bahwa sampai saat ini pendekatan militeristik masih menjadi pilihan Jakarta dalam pelanggaran politik penguasaan di Tanah Papua.

DATA KASUS MAKAR TAHUN 2022

NO	KASUS	NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA	DAKWAAN	PUTUSAN	TUNTUTAN	KETERANGAN
1	MAKAR	132/Pid.B/2022/PN Jap	<ol style="list-style-type: none"> 1. MALVIN YOBE 2. ZODE HILAPOK 3. MELVIN FENANDO WAINE 4. DEVIO TEKEGE 5. MAKSIMUS SIMON PETRUS YOU 6. LUIS KITOK UROP MABIN 7. YOSEP ERNESTO MATUAN 8. AMBROS FRANSISKUS ELOPORE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PASAL 106 KUHP Jo PASAL 55 AYAT(1) KE- 1 2. PASAL 110 AYAT (1) KUHP 		1 TAHUN TAHANAN	MASIH DALAM PROSES SIDANG
2	MAKAR	530/Pid.B/2021/PN Jap	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASER RUMERE 2. YUKILA TABUNI 3. KUNDRAT RUMKOREM 4. ABRAHAM RUMKOREM 		10 BULAN MASA TAHANAN (BEBAS)		TANGGAL 26 JUNI AKAN DI BEBSAKAN
3	MAKAR	376/PID.SUS/2021PN.Jap	VIKTOR FREDRIK YEIMO	PASAL BERLAPIS ❖ PASAL 106 KUHP Jo PASAL 55 AYAT (1) KUHP ❖ PASAL 110 AYAT (1) KUHP ❖ PASAL 110 AYAT (2) ke- 1 KUHP ❖ PASAL 160 KUHP Jo PASAL 55 AYAT (1) ke-1 KUHP.			DALAM PROSES PERSIDANGAN

Kedaulatan Negara dan Persatuan Bangsa merupakan sesuatu hal yang harus di pertahankan oleh Negara tanpa terkecuali, kehilangan Persatuan dari sebuah Negara sendiri adalah sebuah tanda kelemahan dan akan melemahkan Pertahanan sebuah Negara. Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang di dirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Pancasila, yang di dalamnya telah di atur berbagai peraturan-peraturan yang melindungi Hak –Hak Dasar dan Kewajiban dari setiap Warga Negara Indonesia. Sehingga warga Negara Indonesia berhak untuk melakukan setiap kegiatan, baik secara pribadi maupun kelompok. Selain itu salah satu Hukum yang di gunakan bangsa indonesia adalah Hukum Pidana yang mana Hukum Pidana merupakan Hukum warisan Belanda (Netherland). Di mana Hukum Pidana lebih mengatur tentang Ketentuan, Pelanggaran, Kejahatan yang di lakukan oleh warga Negara Indonsia. Dalam Hukum Pidana di Indonesia sering kita jumpai mengenai tindakan yang melanggar aturan di antaranya ialah dapat di kenakannya dalam delik tersebut, satu tindakan yang sangat kita pahami masalah pemberontakan yang di lakukan oleh warga Negara terhadap kedaulatan Bangsa dan Negara baik yang di lakukan secara perorangan atau individualisme ataupun di lakukan secara berkelompok ataupun kolektif. Di samping itu juga kita kenal dengan istilah MAKAR, banyak di antaranya dengan konsep-konsep dan idealisme terhadap kebebasan, ketidakpuasan, dan ketidakpercayaan pada sebuah Negara yang menimbulkan Makar. Yang di maksud dengan Makar berdasarkan KBBI adalah Perbuatan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Dampak dari perbuatan ini bukanlah sebuah hal yang biasa, tentunya hukuman yang setimpal akan menimpa pelakunya berdasarkan tingkatan kejahatannya. Tentu saja beberapa perbuatan yang di anggap melakukan makar di antaranya, makar dengan menghancurkan kepala Pemerintahan yang sah, apabila hal tersebut terjadi maka pelakunya akan di kenakan pasal 104 KUHPidana yaitu “Makar dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama Dua Puluh Tahun”. Perbuatan Makar dengan maksud memisahkan wilayah Indonesia atau menjatuhkannya ke tangan musuh.

Hal ini juga di atur dalam pasal 106 KUHPidana yaitu “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. Selain itu juga ada perbuatan yang di sebut sebagai perbuatan makar apabila makar itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan menjatuhkan

pemerintah, hal ini di atur dalam pasal 107 KUHPidana ayat 1 dan 2 . Kebebasan Makar adalah suatu pemberontakan terhadap keutuhan Negara dan Bangsa dengan cara yang di lakukan oleh individu maupun kelompok dengan alasan bahwa mereka merasa ketidakpuasan terhadap system atau kebijakan yang di lakukan oleh sebuah pemerintahan. Perbuatan Makar telah di pandang sebagai sebuah kejahatan yang serius sejak pembentukan Kitab Undang –Undang Hukum Pidana. Makar yang merupakan satu kejahatan yang objeknya ialah Kepala Negara dan keutuhan satu Negara.

Dalam perjalanan kehidupan warga Negara Indonesia secara khusus Masyarakat Papua yang merasa bahwa setiap kegiatan yang di lakukan oleh sekelompok orang ataupun individu merupakan satu tindakan yang berarah kepada Makar. seperti halnya dengan beberapa kasus yang terjadi di papua terkait dengan perbuatan Makar, ada beberapa kasus yang di dakwakan kejahatan melawan Negara. seperti kasus 7 Mahasiswa Papua yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 2021 di GOR Cenderawasih Jayapura Papua dengan Nomor Perkara 132/Pid.B/2022 PN.jap yang di Dakwakan dengan perbuatan Makar sebagaimana di maksud dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam tuntutan yang di berikan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Namun sebaliknya apa yang di lakukan oleh para terdakwa saat melakkan aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora, para terdakwa melakukan aksi mereka dengan berlaku sopan, dan tidak ada perlawanan saat aparat keamanan melakukan penangkapan. Melihat kondisi dan situasi HAM di Papua, masyarakat papua merasa bahwa tidak adanya keadilan bagi masyarakat papua dengan menutup setiap kegiatan-kegiatan, aspirasi dan pendapat yang semakin hari dibungkam. Negara harus dapat melakukan perbedaan setiap kegiatan atau apresiasi yang di lakukan khusus masyarakat Papua semuanya tidak berarah kepada Makar, dan saat melakukan aksi pengibaran saat itu apakah Papua sudah melakukan perlawanan terhadap Negara ? Di dalam pasal 87 KUHPidana menegaskan bahwa Tindak Pidana Makar baru di anggap terjadi apabila telah di mulainya perbuatan-perbuatanpelaksanaan dari si pembuat Makar (Penyerangan), selain itu suatu perbuatan dapat di katakan Makar atau annslag apabila di lakukan dengan kekerasan.

Melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di papua terkait dengan Pasal Makar yang sering di Dakwaan terhadap setiap Individu ataupun kelompok yang

ANALISA MAKAR

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Atribut Papua (seperti gambar Bendera Bintang Kejora), ataupun melakukan perlawanan dan juga kegiatan yang mengarah kepada politik, maka Negara akan menggunakan Pasal-Pasal yang mungkin sebenarnya tidak terbukti sehingga Negara dengan tidak sadar telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia(DUHAM).

LAMPIRAN TABEL/TABLE ATTACHMENT

Tabel Penangkapan Sewenang-wenang / Arbitrary Arrest Table

No	Hari, Tanggal/ Date and Time	Lokasi/Location	Nama-nama korban Penangkapan Sewenang- wenang/ names of victims of arbitrary arrest	Pelaku/ perpetrator
1	04/02/ 2022	Sentani, Kabupaten Jayapura	Steven Itlay (31), Pais Nasia (24), Yemue Itlay (17), Calvin Haluk (19), Apner Haluk (17), Ongko Haluk (16), Otto Walilo (22), Amrosius Haluk (20)	Kepolisian Resort Sentani.
2	23/02/2022	Ilaga Kabupaten Puncak	Warga alas Mundirok, bernarga Kogoya (nama belum diketahui)	Aparat TNI- POLRI di Ilaga
3	24/02/2022	Ilaga Kabupaten Puncak	Nama Mirinus Telenggen (19)	Aparat TNI- POLRI di Ilaga
4	24/3/2022	Jayapura	Buctar Tabuni di Tngkap dengan 6 orang lainnya(cari nama-nama)	Polresta Jayapura
	29/3/2022	Jayapura	Tangkap 21 orang anggota KNPB saat pulang dari pemakan Yohanes koyop, Yuber kalakmabin, Utama Kadepa, Marsel Douw, Abraham Douw, Frans Dogopia, Frian Soll, Luky Wisaplbla, Doni Pekey, Frans yobee, Petrus Dogomo, Rony Goo, Erepul Sama, Dani Esema, Elimas Sugun, Jhon Kadepa, Jhon kobak, Deni Matuan, Jefry Tagi, Frengky Edoay, Bob Wenda	Polresta Jayapura

LAMPIRAN TABEL/TABLE ATTACHMENT

Tabel Penganiayaan, pemukulan, dan pembungkaman ruang berekspresi/ Table of Persecution, beating and silencing of space of expression

No	Hari, Tanggal/ Date and Time	Lokasi/Location	Nama-nama korban penganiayaan, pemukulan, dan pembungkaman ruang berekspresi/ names of victims Persecution, beating and silence expression space	Pelaku/ perpetrator
1	22 Februari 2022	Distrik Sinak, Kab. Puncak	<p>7 anak Korban penganiayaan 6 dirawat dirumah sakit dan 1 meninggal:</p> <p>Derson Murib (SD kelas 5), Disaliman Kulua (SD Kelas 4), Aibon (SD), Elison Murib (SD), Aton Murib (SD), Weiton Murib (SD), Makilon Tabuni (SD Kelas 6) Meninggal Dunia.</p>	<p>aparatus TNI di Bandara Tapulinik Distrik Sinak Kabupaten Puncak</p>
2	8/3/2022	Tanah Hitam, Abepura, Jayapura	<p>Korban pemukulan pembubaran paksa demo tolak DOB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Okot Lokobal (Dipukul pakai koper senjata di bagian Tangan Kiri) 2. Frengki mulai kena Strom di bagian pinggang samping bagian kanan 3. Simon Doga (Kena Tembakkan gas Air mata) 4. Melkius Elopere (di tinju pake karet mati) 5. Abet Tabuni (disenggol oleh Mobil Brimob di kaki bagian kanan) 6. Lewa Tabuni (di dorong sehingga menjadi luka bagian siku Tangan) 7. Yustinus Wandik (Diancam dengan Cara menarik Mengambil mekapon secara paksa sehingga Polri Menghancurkan Mekapon) 	<p>Gabungan TNI-POLRI</p>

LAMPIRAN TABEL/TABLE ATTACHMENT

<p>Kamis, 11/3/2022</p>	<p>Jakarta</p>	<p>6 Mahasiswa Mengalami Kekerasan Fisik dan Seksual Saat aksi tolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang dilakukan mahasiswa Papua se-Jabotabek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ince (Ditendang oleh aparat di dada hingga pingsan) 2. Bob (Luka gores di kaki dan ditendang di ulu hati) 3. Samuel Purwaro (Ditendang dan ditarik oleh polisi ke dalam mobil tahanan hingga mengalami luka di mata kanan) 4. Deris Murib (Dipukul di bagian dahi hingga benjol dan ditendang dibagian belakang) 5. Deten (Dipukul menggunakan helm polisi di bagian kepala). 6. Gudel (Mengalami luka-luka di badan dan giginya retak. Kemaluannya ditarik lalu ponsel diambil, tetapi sekarang sudah dikembalikan) 	<p>Aparat Gabungan TNI/Polri</p>
<p>Selasa (15/03/22)</p>	<p>Yahukimo</p>	<p>Korban perlakuan represif aparat saat demo tolak Daerah Otonomy Baru,</p> <p>Nama-nama Korban Meninggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yakob Meklok (L/39) kena peluru di ketiak bawah kanan dan bersarang dalam tubuh. Meninggal di tempat. 2. Erson Weipsa (L/21) Kena Tembak punggung belakang masuk dada. Meninggal setelah dibawa ke RS 3. Erson Weipsa (L/21) kena punggung belakang masuk dada. Meninggal setelah dibawa ke RS. <p>Nama-nama korban luka Berat di Rumah Sakit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anton Itlay (L/23) Terkena Peluru di Paha 2. Ripen Keroman (L/20) Terkena Peluru di bagian kaki 	<p>TNI/POLRI</p>

			<p>3. Omori Bahabol (L/22), Terkena Peluru di paha</p> <p>Nama-nama korban luka rawat jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setti Kobak (L/23), Kena peluruh Nyasar 2. Lukas Busup (L/37), Luka ringan 3. Ance Kanningga (L/17), Luka ringan 4. Luky Kobak (L/21), Luka ringan 5. Miren Omu (L/22), Luka ringan 	
18/3/2022	Timika	<p>Penangkapan dan pemukulan terhadap massa aksi tolak DOB</p> <p>Nama-nama massa aksi yang ditangkap:</p> <p>Fredi Yeimo (28), Yonatan Tenoye (22), Yusak wandagau (22), Yulius Kogoya (25), Yas Wanimbo (58), Yeferson Tabuni (17), Noris Waker (17), Yas Wanimbo (42)</p> <p>Nama-nama massa aksi yang dipukul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ardi (dipukul sementara orasi sedang berlangsung (Luka di kepala dengan Popor senjata dan dipukul di Rahang Kanan tepat dibawah telinga). 2. Riman (ditendang menggunakan sepatu laras panjang di rusuk (luka di siku tangan kanan). 3. Okto (dipukul menggunakan popor senjata di dahi), 4. Heni (dipukul dirahang dan tulang pipi), 5. Onan (ditendang dan luka di lutut) 	Aparat Gabungan TNI/POLRI	

LAMPIRAN TABEL/TABLE ATTACHMENT

10/5/2022	Jayapura	17 korban luka-luka tindakan represif aparat saat demo tolak DOB: Damianus Beanal, Welison Wanena, Dina Apray, Usman Hesegem, Magati Wakey, Elita Hiluka, Melan Kogoya, Yatina Sama, Mendiron Wanimbo, Sutri Narek, Deli Wanimbo, Akiman Wonda, Enka Karoba, Otofred Nawipa, Riko Pekey, Apin Meage, Jufin Dogomo.	Aparat Gabungan TNI/POLRI
-----------	----------	---	---------------------------

LAMPIRAN TABEL/TABLE ATTACHMENT

Tabel Pembunuhan diluar hukum/ extrajudicial killing Table

No	Hari, Tanggal/ Date and Time	Lokasi/Location	Nama-nama korban pembunuhan diluar hukum/ name of the victim of extrajudicial killing	Pelaku
1	05/03/2022	Kenyam, Nduga	Parunus Lokbere	TNI
2	5/4/2022	Enarotali Paniai	Petrus Tebai (L/17) (dicek lagi)	TNI/POLRI
3	26/4/2022	Nduga	Musa Nawipa	TNI